

Analisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang

Alfinda Adelia Dirli¹ Ujang Jamaludin² Dinar Sugiana Fitrayadi³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: [ujangjamaludin@untirta.ac²](mailto:ujangjamaludin@untirta.ac.id)

Abstrak

Rendahnya pendidikan dan tingkat ekonomi menjadi faktor utama dari maraknya fenomena anak jalanan di Kota Serang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program, strategi, dan tindak lanjut dari Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial dalam menangani anak jalan adalah berupa program seperti Bulan Bakti yang diadakan setahun sekali, akan tetapi program ini berjalan dengan kurang optimal karena masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya rumah singgah yang dapat digunakan dalam rehabilitasi jangka panjang. Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga masih belum maksimal karena tidak ada tindak lanjut secara komperhensif dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Serang.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Anak Jalanan, Kota Serang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara besar dengan sumber daya yang melimpah, akan tetapi masih belum sanggup untuk menjadikan warganya sejahtera. Penyakit sosial adalah permasalahan di segmen kesejahteraan masyarakat yang masih memerlukan perhatian serius. Hal ini disebabkan karena kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Jika ditarik ke belakang, hal tersebut terjadi karena keterbelakangan pendidikan (Sari, 2019). Pendidikan adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu anak mengembangkan diri, potensi, minat, dan bakat yang dimiliki dan pada akhirnya membentuk pribadi yang berkualitas (Pribadi, 2023). Rendahnya pendidikan yang langsung berimplikasi pada keadaan ekonomi ini mengakibatkan fenomena putus sekolah. angka putus sekolah di Indonesia masih sangat tinggi, berdasarkan data dari Kemendikbudristek tahun 2022 jumlah putus sekolah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 75.303 jiwa (Nainah, 2023). Kemudian ketimpangan ekonomi dan sosial memunculkan fenomena fakir miskin, gelandangan, anjal (anak jalanan), pengamen, pengemis, dan sebagainya. Faktor ekonomi ini juga kemudian memengaruhi pola pikir anak untuk menggeluti dunia kerja. Tuntutan ekonomi menjadi penyebab munculnya persepsi anak terhadap pendidikan dan beralih untuk menggeluti dunia kerja, dan turun ke jalan untuk melakukan aktivitas ekonomi di jalanan. Anak jalanan sendiri menurut PBB (Perserikatan bangsa Bangsa) adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, dan beraktivitas (Maemunah, 2020). Berdasarkan data dari laman Badan Pusat Statistik Nasional tercatat angka kemiskinan di Kota Serang pada tahun 2022 sebesar 45,56 ribu jiwa, pada tahun 2023 sebesar 44,99 ribu jiwa, dan pada tahun 2024 sebesar 41,62 ribu jiwa (BPS Kota Serang). Data tersebut menjadi alasan maraknya anak-anak yang sudah mencari penghidupan di jalanan atau yang biasa dikenal sebagai anak jalanan. Data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menyatakan bahwa jumlah anak jalanan sejak tahun 2017 berjumlah 36.000 jiwa dan terus bertambah hingga 232.894 jiwa pada tahun 2022.

Anak jalanan pada umumnya bekerja sebagai pengasong, pemulung, pengamen, tukang semir, dan tidak jarang menjadi pengemis. Anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni *child on the street* yakni anak yang melakukan kegiatan ekonomi di jalanan namun masih memiliki hubungan kuat dengan orang tua, biasanya mereka membantu ekonomi keluarga karena tekanan kemiskinan. Kemudian *children of the street* yakni anak yang hidup di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi, ada yang masih berhubungan dengan orang tua namun tidak selalu bertemu, lalu ada juga yang di antaranya adalah anak yang kabur dari rumah. Selanjutnya *children from families of the street* yakni anak yang memang lahir dari keluarga yang hidup di jalanan, biasanya kelompok ini memiliki hubungan kekeluargaan yang erat namun hidup secara *nomaden* dengan segala risiko yang ada di jalanan, mereka juga mampu untuk bertahan hidup dalam keadaan keras perkotaan yang tidak bersahabat dengan proses tumbuh kembang anak (Suyanto, 2019). Indonesia sendiri memiliki banyak lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial seperti rumah penampungan yang memberikan sekolah dan tempat tinggal gratis. Akan tetapi hal ini justru bertentangan dengan prinsip anak jalanan, terutama didorong penghasilan yang didapat tanpa adanya tuntutan dari berbagai pihak membuat mereka lebih memilih untuk tetap menjadi seorang anak jalanan, hal ini mengakibatkan jumlah anak jalanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan memerlukan upaya serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan yang konsisten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan tentang pemenuhan kesejahteraan, namun pada kenyataannya permasalahan kesejahteraan sosial semakin berkembang dan menunjukkan adanya hak dasar yang belum terpenuhi dan belum memperoleh pelayanan sosial dari negara walaupun dalam Pasal 34 ayat 1 berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dalam pemeliharaan fakir miskin guna memenuhi kebutuhan yang layak. Kehadiran pemerintah di tengah kehidupan masyarakat merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kehidupan mulai dari masalah ekonomi sampai masalah kesejahteraan sosial. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan *good government*, salah satunya adalah dengan upaya untuk menangani masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dalam hal ini adalah permasalahan anak jalanan. Dalam hal penyelenggaraan sosial diperlukan adanya dukungan dari masyarakat demi terciptanya kesejahteraan sosial”. Keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat terbangun atas kontrak sosial. Implikasi dari kontrak sosial adalah pemerintah dijadikan perwakilan negara yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mobilisasi segenap sumber daya. Fungsi pemerintah berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat salah satunya ialah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, contoh upaya pemerintah yang baik adalah dengan menangani masalah kesejahteraan masyarakat khususnya pada permasalahan anak jalanan yaitu dengan fokus menekankan tingginya angka anak jalanan.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penyakit masyarakat di Kota Serang semakin meningkat. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Serang dalam laman berita <https://titikkata.com/kota-serang-masih-marak-anjal-dan-gepeng-> dinyatakan bahwa Dinas Sosial telah mencoba melakukan segala penanganan seperti pembinaan bagi pengemis di jalanan. Kepala bagian Rehabilitasi Dinas Sosial juga mengungkapkan bahwasanya terdapat ratusan anak jalanan dan gepeng (gelandangan dan pengemis) yang menyebar di enam kecamatan di Kota Serang dan telah terjaring sebanyak 1144 jiwa anak jalanan dengan 118 laki-laki dan 25 perempuan yang tersebar di 6 kecamatan dengan rincian 5 orang dari Kecamatan

Curug, 1 orang dari Kecamatan Walantaka, 36 dari Kecamatan Cipocok Jaya, 75 orang dari Kecamatan Serang, 1 orang dari Kecamatan Taktakan, dan 26 orang dari Kecamatan Kasemen (BPS Kota Serang, 2024). Kepala Dinas Sosial Kota Serang juga menyebutkan bahwasanya penyebaran anak jalanan semakin meningkat, serta tidak adanya dukungan dari masyarakat jika dilihat dari perilaku yang tetap memberikan yang kepada anak jalanan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 21(1) dan (2) yang menyebutkan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- bagi pelanggar. Hal ini memberikan fakta bahwa permasalahan anak jalanan masih sulit untuk diatasi. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh belum optimalnya kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan, kurangnya sosialisasi, penyuluhan pada masyarakat yang akan meningkatkan partisipatif masyarakat, dan kurang optimalnya program rehabilitasi dan rumah singgah untuk menampung dan memberikan pembinaan bagi anak jalanan di Kota Serang.

Kajian penelitian terdahulu mengenai anak jalanan sudah banyak dilakukan, namun setiap sasaran memiliki permasalahan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Syahrudin et al, 2021) dengan judul Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar menjelaskan bahwa program Dinas Sosial Kota Makassar tetap berjalan meskipun belum dapat dikatakan sesuai dengan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dinas Sosial belum Kota Makassar dinilai belum mampu melakukan pembaharuan dalam penanganan yang baik dan kondusif, adapun beberapa strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan patroli, asesmen, pembinaan, pendataan, dan pemberian arahan. Namun pelaksanaan ini masih mengalami hambatan yaitu tidak tersedianya rumah atau wadah rehabilitasi untuk menampung anak jalanan guna membina dan melakukan pelatihan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Jati et al, 2022) dengan judul Evaluasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi menjelaskan bahwa pelaksanaan program dari Dinas Sosial Kota Bekasi belum berjalan efektif dalam menjawab permasalahan fenomena anak jalanan karena evaluasi yang dilakukan belum informatif dalam menyampaikan hasil evaluasi dan belum menunjukkan kemajuan program yang efisien, sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan evaluasi. masih ditemukan permasalahan terhadap sarana dan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang program. Selain itu evaluasi program belum tersusun dan belum melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.

Kemudian yang terakhir penelitian oleh (Mujazin, 2021) dengan judul Perubahan Perilaku Sosial Anak Jalanan Pasca Rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Surabaya menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan tempat penanganan anak jalanan dapat membantu perubahan perilaku sosial anak jalanan setelah berada di jalanan, kemudian dilanjut dengan munculnya tekad serius anak jalanan untuk melakukan perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku ini juga didorong oleh dukungan keluarga dan juga lingkungan yang membantu perubahan berjalan cepat, dan Ketersediaan pendidikan yang baik untuk pertumbuhan anak jalanan baik untuk dilakukan dalam membantu proses perubahan perilaku sosial anak jalanan. Meski begitu perbedaan tempat, waktu dan karakter subjek penelitian memberikan perbedaan hasil penelitian ini dan hasil penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program, strategi, dan tindak lanjut dari Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang disajikan dengan menguraikan kata-kata yang menggambarkan suatu kejadian (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif adalah penelitian Sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif apabila seseorang dapat menyajikan data yang didapatkan dengan sebenar-benarnya yang terjadi di lokasi penelitian, yang kemudian setelah data terkumpul kemudian diolah menjadi uraian kalimat dan bukan berupa angka (Setyawan, 2024). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Serang, lebih tepatnya di jalanan yang terdapat anak jalanan dan kantor Dinas Sosial Kota Serang. Kota Serang diambil karena Berdasarkan catatan dari BPS Kota Serang dalam publikasi “Kota Serang Dalam Angka” tercatat Kota Serang masih menjadi daerah dengan penyebaran anak jalanan yang cukup tinggi di berbagai Kecamatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti Kepala Dinas Sosial Kota Serang dan SatPol PP, anak jalanan dengan rentang usia 7-18 tahun, dan masyarakat yang terdampak dengan adanya anak jalanan. Kemudian observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang khususnya pada Bidang Anak Jalanan untuk melihat sejauh mana Peraturan Daerah Kota Serang dalam pelaksanaannya. Lalu dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan dokumen terkait program kerja, foto kegiatan serta dokumen lainnya. Selain itu, analisis dokumen resmi sebagai pedoman dalam penelitian ini dapat digunakan dokumen resmi Peraturan Daerah Kota Serang khususnya pada Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan menjadi sumber data utama atau primer, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari dari sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan.

Data sekunder ini merupakan hasil olahan data dari data primer yang disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data ataupun pihak lain yang menunjang penelitian ini. Setelah hasil penelitian didapatkan, kemudian peneliti mengolah data tersebut menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berupa bentuk singkat dan ringkasan sesuai data yang dibutuhkan. Penyajian data disajikan dalam uraian atau deskriptif, dan tabel. Kemudian penarikan kesimpulan dan juga verifikasi sebagai langkah terakhir analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel (Sugiyono, 2019). Kemudian penelitian ini menggunakan keabsahan data untuk menguji validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam penelitian, dan penelitian ini menggunakan uji keabsahan objektivitas dan triangulasi yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagai keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial adalah lembaga pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial masyarakat, terlebih mereka yang membutuhkan bantuan seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, lebih tepatnya di jalanan Kota Serang yang terdapat anak jalanan dan juga di kantor Dinas Sosial Kota Serang yang terletak di Jl. KH.Sulaeman No.20, Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42114. Tugas pokok dari Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Munculnya anak

jalanan di Kota Serang adalah permasalahan serius, apalagi anak-anak dengan rentang usia produktif atau usia wajib belajar. Dalam hal ini pemerintah Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan menjawab permasalahan mengenai rasa aman, nyaman, dan tentram sehingga tidak ada lagi penyakit masyarakat yang muncul. Peraturan ini mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelarangan serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari dampak negatif yang akan timbul di dalam masyarakat. Hal ini, juga tertulis dan dimuat ke dalam pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perda tersebut kemudian dijadikan landasan Dinas Sosial Kota Serang untuk menyusun strategi dan mengimplementasikan penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) terutama anak jalanan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa program yang disusun dalam menangani anak jalanan dan telah berjalan rutin dalam perencanaan tahunan. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa sudah terdapat program untuk menangani maraknya anak jalanan yang sudah berjalan, program tersebut bernama Bulan Bakti. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa strategi yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Serang disusun untuk 1 tahun, salah satunya adalah Bulan Bakti yang berorientasi pada penanganan anak jalanan. Dalam pelaksanaan Bulan Bakti, Dinas Sosial Kota Serang bekerja sama dengan SatPol PP, Lembaga Perlindungan Anak, dan para pendamping untuk melakukan penjangkauan anak jalanan. Kemudian di luar program Bulan Bakti ada juga Monitoring dan Penjangkauan yang dilakukan secara kondisional bersama SatPol PP Kota Serang yang dilakukan di area sekitaran lampu merah, namun tugas Dinas Sosial hanya melakukan himbauan, karena tupoksi Dinas Sosial sendiri untuk rehabilitasi sosial setelah dilakukannya penjangkauan dan penjangkauan. Instansi yang bertugas secara teknis untuk melakukan penjangkauan dan penjangkauan kepada anak jalanan adalah SatPol PP Kota Serang. Selain itu SatPol PP Kota Serang sendiri memiliki kegiatan pendukung yakni patroli rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa proses rehabilitasi anak jalanan belum maksimal karena tidak adanya rumah singgah yang memadai untuk rehabilitasi jangka panjang, maka dari itu Dinas Sosial Kota Serang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Sentra Galih Pakuan Bogor dalam melakukan pembinaan. Kini Dinas Sosial Kota Serang hanya memaksimalkan ruang belakang kantor Dinas Sosial sebagai rumah singgah sementara, untuk menunjang program Bulan Bakti. Meski seperti itu Dinas Sosial Kota Serang telah menyusun beragam strategi dan rencana tahunan termasuk menangani anak jalanan. Tersusun beberapa strategi dalam menangani anak jalanan, beberapa di antaranya ialah Bulan Bakti, Patroli dan Penjangkauan, Himbauan dan Bimbingan, dan Rujukan Rehabilitasi. Setelah melakukan Bulan Bakti, Dinas Sosial Kota Serang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk melakukan rujukan anak jalanan yang akan direhabilitasi dan diberikan pelatihan untuk membekali mereka setelah keluar dari rehabilitasi.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang disusun oleh Dinas Sosial Kota Serang masih mengalami beberapa kendala pada pelaksanaannya. Dalam melaksanakan evaluasi, Dinas Sosial Kota Serang melakukan rapat untuk mengkaji kinerja dalam penanganan anak jalanan. Kemudian melihat tingkat keberhasilan dan jumlah anak jalanan yang terjaring oleh Dinas Sosial, evaluasi ini juga diadakan dengan PJ Walikota Serang dan instansi terkait untuk membahas evaluasi program secara bersama-sama. Di sisi lain berdasarkan wawancara kepada anak jalanan, peneliti menemukan bahwa terdapat anak jalanan yang sudah pernah terjaring SatPol PP, akan tetapi

masih terdapat anak jalanan yang belum pernah terjaring. Peneliti juga menemukan, bagi anak jalanan yang terjaring, hanya dilakukan himbauan dan pendataan oleh Dinas Sosial dan belum sampai pada tahap pembinaan dan rehabilitasi. Kemudian juga ditemukan bahwa program Bulan Bakti belum terlaksana dengan maksimal karena Dinas Sosial dinilai hanya melarang anak jalanan untuk mencari rezeki, akan tetapi tidak memberikan solusi konkret terhadap kondisi ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak anak jalanan yang tidak diberikan pelatihan dan pembinaan yang telah menjadi hak mereka. Hal ini yang kemudian menjadi penilaian bahwa program Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan seperti Bulan Bakti masih jauh dari capaian program. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak lanjut Pemkot Serang dalam penanganan anak jalanan, peneliti menemukan bahwa program yang telah disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat belum menjadi penanganan yang efektif mengurangi penyebaran anak jalanan. Fakta dan data yang ditemukan setiap tahunnya menjadi bukti meningkatnya penyebaran anak jalanan di Kota Serang, melihat fakta tersebut peneliti mengajukan pertanyaan terkait tindak lanjut yang dilakukan pemerintah sejauh ini menanggapi kendala dan hasil evaluasi yang ditemukan setelah pelaksanaan. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa sejauh ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan pemerintah Kota Serang menanggapi permasalahan dan kendala yang ditemukan di lapangan pada saat mengimplementasikan program selama beberapa tahun. Selain itu jumlah anak jalanan di Kota Serang semakin meningkat, membuktikan bahwa program yang telah disusun tidak efektif dalam menangani permasalahan Anak Jalanan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani anak jalanan di Kota Serang dilakukan melalui beberapa kegiatan yang sudah dirancang dalam program tahunan belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti tidak adanya rumah singgah yang harusnya dipergunakan sebagai tempat rehabilitasi jangka panjang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ali et al, 2021) yang menyebutkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Makassar juga belum terlaksana dengan optimal, lalu juga sejalan dengan penelitian (Jati et al, 2022) yang juga menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Bekasi program penanganan anak jalanan seperti rehabilitasi belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan evaluasi program tersebut belum informatif dalam penyampaian hasil evaluasi serta belum menunjukkan kemajuan efisien program, sehingga belum sesuai dengan lima langkah pelaksanaan evaluasi program tersebut. Meski begitu strategi Dinas Sosial Kota Serang sesuai dengan teori strategi Stephanie K. Marrus dalam (Hidayatullah, 2023) yang menyatakan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Adapun, beberapa program yang diusung oleh Dinas Sosial dalam menangani PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) salah satunya yaitu Bulan Bakti, program lainnya yang sejalan adalah patroli rutin yang dijalankan oleh Satpol PP, hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Ali et al, 2021) yang bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani anak jalanan. Dalam hal ini faktor sumber daya yakni fasilitas ada faktor terbesar belum maksimalnya program penanganan anak jalanan di Kota Serang.

Dari program Bulan Bakti yang telah dijalankan, Dinas Sosial Kota Serang melakukan evaluasi pada program ini adalah dengan metode rapat pertemuan selesai kegiatan, dilakukan bersama dengan instansi yang berkoordinasi juga. Adapun terdapat evaluasi lain yaitu evaluasi tahunan untuk mengkaji rancangan kerja tahunan yang diadakan di penghujung kepengurusan. Hal ini sejalan dengan pengertian evaluasi sumatif menurut Arikunto dalam (Rahmi, 2023)

yaitu evaluasi yang melihat hasil keseluruhan dari suatu, program yang telah selesai dilaksanakannya program. Dinas Sosial melakukan jenis evaluasi sumatif yang dilaksanakan pada tiap selesai kegiatan untuk melihat keberhasilan program. Jika ditinjau dari teori evaluasi i Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman (2012) dalam (Jati et al, 2022) yakni *Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program*, dan *Focus the Evaluation*, maka evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang belum maksimal karena hanya di fase *Assess Context* atau menilai konteks permasalahan yang ada tanpa ada tindak lanjut yang komperhensif dan fase *Describe the Program* yakni melihat apakah pelaksanaan program berjalan dengan baik atau tidak, dan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya.

Kemudian pemerintah belum menindaklanjuti kendala yang dialami Dinas Sosial setiap tahun, seperti perbaikan atau pengadaan rumah singgah yang dapat digunakan untuk rehabilitasi jangka panjang. Ataupun inovasi program agar lebih menekan angka anak jalanan di Kota Serang. Tindak lanjut atau dapat dikatakan rencana tindak lanjut merupakan rencana kerja yang dibuat pada tahap berikutnya, termasuk memuat perubahan, pembenahan, menyesuaikan juga dengan perubahan kebutuhan dan permasalahan yang akan dihadapi di lokasi (Khoriba, 2022). Maka, dapat disimpulkan tindak lanjut juga adalah usaha perbaikan serta pengembangan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa tidak adanya respon dan tindakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan penanganan anak jalanan. Namun hasil penelitian juga menemukan bahwa rehabilitasi yang rutin dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Provinsi Banten telah menjadi kegiatan tindak lanjut yang dilakukan dalam menangani anak jalanan. Kegiatan rujukan rehabilitasi ini juga menjawab banyak kekhawatiran masyarakat dan keresahan masyarakat terhadap keberadaan fenomena anak jalanan. Rujukan rehabilitasi ini dapat menjadi langkah awal perbaikan angka penyebaran anak jalanan di Kota Serang. Hal ini, juga sejalan bunyi teori rehabilitasi sosial dalam Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami difungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial.

KESIMPULAN

Terdapat strategi Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Serang seperti Bulan Bakti yang dilakukan setahun sekali. Program Bulan Bakti adalah program penjangkauan yang ditujukan untuk menjangkau anak jalanan. Dalam program ini Dinas Sosial Kota Serang bekerja sama dengan SatPol PP Kota Serang untuk menjangkau dan menjangkau anak jalanan yang kemudian oleh Dinas Sosial dilakukan bimbingan, pendataan, dan rujukan rehabilitasi jangka panjang. Namun, program ini dinilai kurang efektif dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Serang dilihat dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan, seperti fasilitas penunjang. Lalu dalam tahap evaluasi Dinas Sosial juga belum melakukan dengan maksimal karena evaluasi dilakukan dengan metode yang sama setiap tahun, dan bahan evaluasi seperti kurangnya fasilitas semacam rumah singgah yang sudah diajukan belum juga mendapatkan perhatian khusus. Dalam tindak lanjut, program Bulan Bakti juga dinilai kurang efektif karena masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaan yang membuat program Bulan Bakti stagnan tidak mengalami perubahan, dan angka anak jalanan yang tidak menurun bahkan terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., Muhammadiyah, A., & Abdi, A. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5), 1662-1676.

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5IzI=/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota-.html>
- Jati, A. P., Utami, S. B., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bekasi. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 170-175.
- Juliastuti, J., Hidayat, S., Jamaludin, U., & Leksono, S. M. (2024). Analisis Nilai Pendidikan Islam dan Nilai Pendidikan Karakter Pemimpin Melalui Tembang Tradisional Lagu Lir-ilir Karya Sunan Kalijaga. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 8(3), 462-472.
- Khoriba, F. S. (2022). Rancangan Tindak Lanjut Paska Pelaksanaan Diklat di SMA Swasta Budisatrya. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*.
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193-211.
- Mujazin, K. Z. H. (2021). Perubahan Perilaku Sosial Anak Jalanan Pasca Rehabilitasi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Surabaya. *Jurnal PUBLIQUE*, 2(2), 122-136.
- Hidayatullah, M. A. (2023). Analisis Strategi Promosi Personal Selling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Beringharjo Dolopo, Madiun terhadap Loyalitas Anggota. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(1), 79-103.
- Nainah, E., Jamaludin, U., & Bahrudin, F. A. (2023). Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar Sebagai Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara (Studi Deskriptif Di Smp Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang-Banten). *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit*, 12(1), 29-40.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Pribadi, R. A., & Jamaludin, U. (2023). Karakteristik Belajar dan Pembelajaran Anak Usia Sekolah Dasar (SD). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 4744-4753.
- Sari, D. A., Jamaludin, U., & Taufik, M. (2019). Penguatan pendidikan karakter disiplin pada peserta didik melalui pemberian reward dan punishment di SD Unggulan Uswatun Hasanah. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 3(1), 1-16.
- Setyawan, M., D. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Kehidupan Multikultural Peserta Didik di Sekolah (Studi Deskriptif pada Kelas X SMA Negeri 2 Kota Tangerang). Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang
- Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, P. D. (2019). Sosiologi Anak. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Syahrudin, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1621-1626.